BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 26 April 2019

Nomor : 133 /S/XVIII.SMG/04/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018

Yth. Bupati Karanganyar
di
Karanganyar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
   Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018.
2. **Sistem Pengendalian Intern**
   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
   1) Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan (P3) BKD belum melakukan pemutakhiran data PBB Tahun 2018, serta belum dilakukan penagihan atas PBB PBB-P2 atas jalan tol dan bangunan yang mendukung fungsi jalan tol, sehingga piutang pendapatan belum menggambarkan nilai yang sebenarnya dan terdapat potensi pajak yang belum dipungut dan ditetapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah;
   2) Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tanah belum dicatat secara memadai mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar TA